

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

BPTU HPT INDRAPURI
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

JLN. BANDA ACEH MEDAN KM 24,5 INDRAPURI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU HPT INDRAPURI adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT INDRAPURI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU HPT INDRAPURI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

INDRAPURI, 14 JANUARI 2019
KEPALA BALAI,

DRH. VIERMAN
NIP. 196512201992031003

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU HPT INDRAPURI yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

INDRAPURI, 14 JANUARI 2019
KEPALA BALAI,

DRH. VIERMAN
NIP. 196512201992031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTU HPT INDRAPURI Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp992.933.000,00 atau mencapai 116,78% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp850.269.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp14.645.344.705,00 atau mencapai 98,27% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.903.491.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.184.663.051.924,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.649.421.674,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp7.182.541.763.444,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp6.115.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.184.663.051.924,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp992.933.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp15.191.448.252,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14.198.515.252,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-285.911.296,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.484.426.548,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp7.184.919.602.461,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14.484.426.548,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp168.650.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.587.411.705,00

sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp7.184.191.237.618,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTU HPT INDRAPURI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	850.269.000,00	992.933.000,00	116,78	713.919.500,00
Jumlah Pendapatan		850.269.000,00	992.933.000,00	116,78	713.919.500,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.976.063.000,00	5.258.525.987,00	105,68	5.129.680.171,00
Belanja Barang	B.4.	8.444.898.000,00	7.915.383.639,00	93,73	7.555.872.243,00
Belanja Modal	B.5.	1.482.530.000,00	1.471.435.079,00	99,25	1.419.279.925,00
Jumlah Belanja		14.903.491.000,00	14.645.344.705,00	98,27	14.104.832.339,00

II. NERACA

BPTU HPT INDRAPURI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	34.532.296,00
Persediaan	C.1.2.	1.649.421.674,00	1.250.942.850,00
Jumlah Aset Lancar		1.649.421.674,00	1.285.475.146,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	7.156.993.131.000,00	7.156.993.131.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	13.011.753.244,00	12.526.137.165,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17.337.870.008,00	16.478.581.008,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	7.787.461.024,00	7.658.931.024,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	694.550.000,00	764.550.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-12.887.250.026,00	-10.764.848.086,00
Jumlah Aset Tetap		7.183.007.515.250,00	7.183.656.482.111,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	54.615.000,00	54.615.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-48.500.000,00	-42.437.500,00
Jumlah Aset Lainnya		6.115.000,00	12.177.500,00
Jumlah Aset		7.184.663.051.924,00	7.184.954.134.757,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.4.1.	0,00	34.532.296,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	34.532.296,00
Jumlah Kewajiban		0,00	34.532.296,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	7.184.663.051.924,00	7.184.919.602.461,00
Jumlah Ekuitas		7.184.663.051.924,00	7.184.919.602.461,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		7.184.663.051.924,00	7.184.954.134.757,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTU HPT INDRAPURI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	992.933.000,00	662.419.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		992.933.000,00	662.419.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.258.525.987,00	5.129.680.171,00
Beban Persediaan	D.3.	2.382.713.592,00	2.279.846.900,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.107.463.118,00	2.906.472.342,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	847.260.235,00	1.252.556.582,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.067.206.574,00	992.021.619,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.128.464.440,00	2.534.714.930,00
JUMLAH BEBAN		14.791.633.946,00	15.095.292.544,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-13.798.700.946,00	-14.432.873.544,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	51.500.500,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	584.862.902,00	7.580.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	800.774.198,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-215.911.296,00	59.080.500,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-14.014.612.242,00	-14.373.793.044,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTU HPT INDRAPURI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	7.184.919.602.461,00	134.280.360.666,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-14.014.612.242,00	-14.373.793.044,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	168.650.000,00	7.051.622.122.000,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	168.650.000,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	7.051.622.122.000,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	13.589.411.705,00	13.390.912.839,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	7.184.663.051.924,00	7.184.919.602.461,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU HPT INDRAPURI

BPTU HPT INDRAPURI didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging berkelanjutan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, Produksi, Pemuliaan, Pengembangan, Penyebarandan Distribusi bibit unggul, khususnya Sapi Aceh, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU HPT INDRAPURI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTU HPT INDRAPURI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTU HPT

INDRAPURI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTU HPT INDRAPURI yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT INDRAPURI adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTU HPT INDRAPURI telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	850.269.000,00	850.269.000,00
Jumlah Pendapatan	850.269.000,00	850.269.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.390.039.000,00	4.953.027.000,00
Belanja Lembur	39.936.000,00	23.036.000,00
Belanja Barang Operasional	1.576.816.000,00	1.532.576.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.548.210.000,00	1.733.560.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.784.000.000,00	2.959.275.000,00
Belanja Jasa	155.800.000,00	188.900.000,00
Belanja Pemeliharaan	885.097.000,00	900.597.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	871.900.000,00	1.129.990.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	19.569.300.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.720.000,00	494.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	348.626.000,00	860.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	128.530.000,00
Jumlah Belanja	34.383.444.000,00	14.903.491.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp992.933.000,00 atau mencapai 116,78% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp850.269.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	850.269.000,00	992.933.000,00	116,78
Jumlah	850.269.000,00	992.933.000,00	116,78

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 39,08% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTU HPT INDRAPURI adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan pada tahun 2019 dengan penerima sebesar Rp. 992.933.000 penerimaan dari penjualan Sapi Afkir yang tidak Produktif pada tahun 2019

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	992.933.000,00	713.919.500,00	39,08
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	992.933.000,00	713.919.500,00	39,08

Realisasi Pendapatan pada tahun 2019 dengan penerima sebesar Rp. 992.933.000 penerimaan dari penjualan Sapi Afkir yang tidak Produktif pada tahun 2019

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp14.645.344.705,00 atau 98,27% dari anggaran belanja sebesar Rp14.903.491.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	4.976.063.000,00	5.258.531.833,00	105,68

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Barang	8.444.898.000,00	7.915.383.639,00	93,73
Belanja Modal	1.482.530.000,00	1.471.435.079,00	99,25
Total Belanja Kotor	14.903.491.000,00	14.645.350.551,00	98,27
Pengembalian Belanja		-5.846,00	0.00
Total Belanja	14.903.491.000,00	14.645.344.705,00	98,27

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,83% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi Tahun 2018 senilai Rp. 14.104.832.339 dan realisasi tahun berjalan senilai Rp. 14.645.344.705

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.258.525.987,00	5.129.680.171,00	2,51
Belanja Barang	7.915.383.639,00	7.555.872.243,00	4,76
Belanja Modal	1.471.435.079,00	1.419.279.925,00	3,67
Total Belanja	14.645.344.705,00	14.104.832.339,00	3,83

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.258.525.987,00 dan Rp5.129.680.171,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,51% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan jumlah pegawai karena penerimaan CPNS

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.240.652.833,00	5.129.680.171,00	2,16
Belanja Lembur	17.879.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.258.531.833,00	5.129.680.171,00	2,51
Pengembalian Belanja Pegawai	-5.846,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.258.525.987,00	5.129.680.171,00	2,51

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.915.383.639,00 dan Rp7.555.872.243,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,76% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena terjadi penurunan pagu Anggaran dan optimalisasi serapan anggaran.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.528.571.000,00	1.162.156.000,00	31,53
Belanja Barang Non Operasional	1.393.174.001,00	1.620.922.954,00	-14,05
Belanja Barang Persediaan	2.895.577.212,00	2.556.800.000,00	13,25
Belanja Jasa	185.718.117,00	151.803.688,00	22,34
Belanja Pemeliharaan	845.136.735,00	1.100.578.282,00	-23,21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.067.206.574,00	992.021.619,00	7,58
Jumlah Belanja Kotor	7.915.383.639,00	7.584.282.543,00	4,37
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-28.410.300,00	-100,00
Jumlah Belanja	7.915.383.639,00	7.555.872.243,00	4,76

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.471.435.079,00 dan Rp1.419.279.925,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja

modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,67% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Modal disesuaikan dengan kebutuhan satker tahun 2019 terdapat kenaikan anggaran belanja modal sehingga terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2018

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.616.079,00	939.279.925,00	-48,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	859.289.000,00	480.000.000,00	79,02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.530.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.471.435.079,00	1.419.279.925,00	3,67
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.471.435.079,00	1.419.279.925,00	3,67

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp483.616.079,00 dan Rp939.279.925,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -48,51% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi Peralatan dan mesin Tahun 2018 senilai Rp. 939.279.925 dan Realisasi tahun berjalan senilai Rp. 483.616.079

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.616.079,00	939.279.925,00	-48,51
Jumlah Belanja Kotor	483.616.079,00	939.279.925,00	-48,51
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	483.616.079,00	939.279.925,00	-48,51

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp859.289.000,00 dan Rp480.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019

mengalami kenaikan sebesar 79,02% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi modal gedung dan bangunan tahun 2018 senilai Rp. 480.000.000 dan realisasi tahun berjalan senilai Rp. 859.289.000

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	859.289.000,00	480.000.000,00	79,02
Jumlah Belanja Kotor	859.289.000,00	480.000.000,00	79,02
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	859.289.000,00	480.000.000,00	79,02

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp128.530.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 senilai Rp. 0 dan realisasi tahun berjalan senilai Rp. 128.530.000

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.530.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	128.530.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	128.530.000,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.532.296,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.649.421.674,00 dan Rp1.250.942.850,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	1.113.882.058,00	822.970.000,00
Bahan untuk Pemeliharaan	47.000,00	978.500,00
Suku Cadang	39.152.800,00	1.192.000,00
Bahan Baku	1.768.816,00	3.781.850,00
Persediaan Lainnya	494.571.000,00	422.020.500,00
Jumlah	1.649.421.674,00	1.250.942.850,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.156.993.131.000,00 dan Rp7.156.993.131.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.009.753.244,00 dan Rp12.526.137.165,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	12.526.137.165,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	483.616.079,00
Saldo per 31 Desember 2019	13.009.753.244,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-9.611.780.758,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	3.397.972.486,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembuatan bak truck Rp 20.000.000,-
2. Mesin potong rumput Rp 8.400.000,-
3. Kamera digital Rp 6.720.000,-
4. Disc flow Rp 37.210.800,-
5. Floting knife fan knife Rp 31.615.199,-
6. Peralatan implement Rp 14.662.780,-
7. Pengadaan Kendaraan Roda 4 senilai Rp. 259.000.000
8. Pengadaan Kendaraan Roda 2 senilai Rp. 34.000.000
9. Pembelian 6 Buah Kursi Ruang rapat, Kursi Biro, Hand Traktor Dan Microscop Portable senilai Rp. 28.526.800
10. Pengadaan 2 unit Finger Print dan Komputer senilai Rp. 22.104.100
11. Pengadaan Toren Air dan Instalasinya senilai Rp. 10.000.000
12. Pembelian Kursi Putar dan Lemari 3 Pintu senilai Rp. 11.376.400

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.337.870.008,00 dan Rp16.478.581.008,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	16.478.581.008,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	35.887.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	823.402.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	17.337.870.008,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-1.165.069.780,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	16.172.800.228,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Pembuatan pagar permanen Rp 173.665.000,-
2. Pembangunan tempat parkir Rp 74.000.000,-
3. Pengembangan Pagar Gudang Alsintan senilai Rp. 146.100.000
4. Pengembangan Gedung Penyimpan Alsintan senilai Rp. 183.700.000
5. Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Pengembangan Mental Pegawai senilai Rp. 150.937.000
6. Perencanaan Kawasan Bull Aceh senilai Rp. 95.000.000
7. Pembuatan Kanopi senilai Rp. 35.887.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.787.461.024,00 dan Rp7.658.931.024,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	7.658.931.024,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	128.530.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	7.787.461.024,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-553.448.250,00

Nilai Buku per 31 Desember 2019	7.234.012.774,00
--	-------------------------

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Pemasangan Instalasi Air Rp. 128.530.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp694.550.000,00 dan Rp764.550.000,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	764.550.000,00
Mutasi Kurang	
Hibah (Keluar)	0,00
Saldo per 31 Desember 2019	764.550.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	764.550.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa:

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-13.281.001.832,00 dan Rp-10.764.848.086,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.009.753.244,00	-9.611.780.758,00	3.397.972.486,00
2.	Gedung dan Bangunan	17.337.870.008,00	-1.165.069.780,00	16.172.800.228,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.787.461.024,00	-553.448.250,00	7.234.012.774,00
4.	Aset Tetap Lainnya	694.550.000,00	0,00	694.550.000,00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi Penyusutan	38.829.634.276,00	-13.281.001.832,00	25.548.632.444,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp54.615.000,00 dan Rp54.615.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	54.615.000,00
Jumlah	54.615.000,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTU HPT INDRAPURI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-54.562.500,00 dan Rp-42.437.500,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	54.615.000,00	-48.500.000,00	6.115.000,00
	Akumulasi Penyusutan	54.615.000,00	-48.500.000,00	6.115.000,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.532.296,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang

diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.184.191.237.618,00 dan Rp7.184.919.602.461,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp992.933.000,00 dan Rp662.419.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	992.933.000,00	662.419.000,00	49,90
Jumlah	992.933.000,00	662.419.000,00	49,90

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2019 dikarena adanya Penjualan Sapi tidak Produktif atau Afkir sebesar Rp. 992.933.000

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.258.525.987,00 dan Rp5.129.680.171,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.589.807.440,00	3.452.697.700,00	3,97
Beban Pembulatan Gaji PNS	45.842,00	50.510,00	-9,24
Beban Tunj. Anak PNS	99.058.914,00	98.980.420,00	0,08
Beban Tunj. Beras PNS	197.272.080,00	200.893.080,00	-1,80
Beban Tunj. Fungsional PNS	397.380.000,00	408.270.000,00	-2,67
Beban Tunj. PPh PNS	7.527.785,00	4.793.491,00	57,04
Beban Tunj. Struktural PNS	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	300.565.926,00	295.716.970,00	1,64
Beban Tunjangan Umum PNS	75.225.000,00	66.235.000,00	13,57
Beban Uang Lembur	17.879.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	525.884.000,00	554.163.000,00	-5,10
Jumlah	5.258.525.987,00	5.129.680.171,00	2,51

Beban mengalami kenaikan sebesar 2,51 % dari tahun sebelumnya dikarenakan tuk tahun ini adanya penambahan Uang lembur untuk Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.382.713.592,00 dan Rp2.279.846.900,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	34.873.260,00	26.114.400,00	33,54
Beban Persediaan konsumsi	2.228.286.600,00	2.230.560.000,00	-0,10
Beban persediaan lainnya	119.553.732,00	23.172.500,00	415,93
Jumlah	2.382.713.592,00	2.279.846.900,00	4,51

Untuk Beban Persediaan untuk tahun 2019 dengan Realisasi Beban Persediaan Bahan Baku, Beban Persediaan Konsumsi dan Beban Persediaan Lainnya ada kenaikan 4,51 % dibandingkan Tahun 2018

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.107.463.118,00 dan Rp2.906.472.342,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	355.470.362,00	436.150.085,00	-18,50
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.020.453.639,00	1.143.222.569,00	-10,74
Beban Barang Operasional Lainnya	82.440.000,00	88.824.000,00	-7,19
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	180.830.000,00	217.680.000,00	-16,93
Beban Honor Output Kegiatan	17.250.000,00	13.140.000,00	31,28
Beban Jasa Konsultan	35.100.000,00	37.275.000,00	-5,84
Beban Jasa Pos dan Giro	4.750.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	7.000.000,00	9.065.000,00	-22,78
Beban Keperluan Perkantoran	1.202.500.000,00	814.434.000,00	47,65
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36.000.000,00	0,00	0,00
Beban Langganan Listrik	102.369.117,00	105.331.688,00	-2,81
Beban Langganan Telepon	499.000,00	132.000,00	278,03
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	55.176.000,00	34.640.000,00	59,28
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.625.000,00	6.578.000,00	15,92
Jumlah	3.107.463.118,00	2.906.472.342,00	6,92

Perbandingan Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,92 % untuk tahun 2019 Realisasi sebesar Rp. 3.107.463.118 sedangkan untuk tahun 2018 Realisasinya sebesar Rp. 2.906.472.342

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp847.260.235,00 dan Rp1.252.556.582,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.628.500,00	778.766.000,00	-74,37

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.750.000,00	30.000.000,00	-67,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	635.758.235,00	441.812.282,00	43,90
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	931.500,00	1.225.300,00	-23,98
Beban Persediaan suku cadang	1.192.000,00	753.000,00	58,30
Jumlah	847.260.235,00	1.252.556.582,00	-32,36

Untuk tahun 2019 beban pemeliharaan mengalami penurunan -32,36 % dibandingkan tahun 2018.

Tida masuk dalam neraca percobaan Beban persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dan Beban persediaan Suku Cadang tidak masuk belanja pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.067.206.574,00 dan Rp992.021.619,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	454.589.409,00	450.450.956,00	0,92
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.020.000,00	32.192.380,00	-90,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	609.597.165,00	509.378.283,00	19,67
Jumlah	1.067.206.574,00	992.021.619,00	7,58

Untuk tahun 2019 beban perjalanan dinas mengalami kenaikan 7,58 % termasuk beban perjalanan biasa 0,92 % serta Beban perjalanan dinas dalam kota -90,62 % dan Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota 19,67 %

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.528.278.746,00 dan Rp2.534.714.930,00. Beban penyusutan adalah

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	410.570.777,00	395.130.013,00	3,91
Beban Penyusutan Irigasi	156.492.212,00	153.268.786,00	2,10
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	433.327.720,00	633.483.291,00	-31,60
Beban Penyusutan Jaringan	105.690.067,00	102.673.400,00	2,94
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.410.072.970,00	1.238.034.440,00	13,90
Jumlah	2.528.278.746,00	2.534.714.930,00	-0,25

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-800.774.198,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	584.862.902,00	7.580.000,00	7.615,87
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	51.500.500,00	-100,00
Jumlah	-215.911.296,00	59.080.500,00	-583,94

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.184.919.602.461,00 dan Rp134.280.360.666,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-14.014.612.242,00 dan Rp-14.373.793.044,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp168.650.000,00 dan Rp7.051.622.122.000,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp168.650.000,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Persediaan Lainnya	168.650.000,00
Jumlah	168.650.000,00

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.051.622.122.000,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.587.411.705,00 dan Rp13.390.912.839,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.645.344.705,00
Diterima dari Entitas Lain	-992.933.000,00
Transfer Keluar	-65.000.000,00
Jumlah	13.587.411.705,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-992.933.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp14.645.344.705,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-65.000.000,00 yang terdiri dari:

- Hibah sapi ke Singosari

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Persediaan Lainnya	018060500411956000KD	-65.000.000,00
Jumlah			-65.000.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.184.191.237.618,00 dan Rp7.184.919.602.461,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Untuk tahun satker BPTU HPT Indrapuri ada perbaikan reval BMN tetap baru terbit LHIP dengan Nomor :

- LHIP-0361/REV/WKN.01/KNL.01/2019 Tanggal 25 – 11 – 2019
- LHIP-0362/REV/WKN.01/KNL.01/2019 Tanggal 25 – 11 – 2019
- LHIP-0363/REV/WKN.01/KNL.01/2019 Tanggal 25 – 11 – 2019
- LHIP-0364/REV/WKN.01/KNL.01/2019 Tanggal 25 – 11 – 2019

Tetapi belum terbit BAR dari KPKNL Banda Aceh

F.2. Pengungkapan Lain-lain